PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENGELOLAAN RUSUNAWA DABAG, CONDONGCATUR, DEPOK, SLEMAN

(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Disusun Oleh :

ERRA KARYASTI DWI KARUNIA

11520066

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

JENJANG PROGRAM S1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA " APMD "

YOGYAKARTA

2016

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENGELOLAAN RUSUNAWA DABAG, CONDONG CATUR, DEPOK, SLEMAN

(Studi Deskriptif Kualitatif di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

ERRA KARYASTI DWI KARUNIA (11520066)

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Pada hari : Senin

Tanggal : 17 Oktober 2016

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD "APMD"

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Parwoto, M.Si Ketua Penguji/Pembimbing	
2. Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si Penguji Samping I	
3. Utami Sulistiana, S.P.,M.P Penguji Samping II	

Mengetahui :

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

MOTTO

SEBAB SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN

(QS. AL INSYIRAH AYAT 5)

BARANG SIAPA MENGHENDAKI KEBAHAGIAAN DI DUNIA MAKA HARUS MENGETAHUI ILMUNYA DAN BARANG SIAPA MENGHENDAKI KBAHAGIAAN HIDUP DI AKHIRAT MAKA HARUS MENGETAHUI ILMUNYA DAN BARANG SIAPA MENGHENDAKI KEBAHAGIAAN KEDUANYA (DUNIA DAN AKHIRAT) MAKA HARUS MENGETAHUI ILMUNYA JUGA (HR. BUKHARI)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- Kedua Orang Tuaku tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan ku
- Kakakku Mas Arga Kurniawan Yudantoro, dan kedua adikku May Adiati Karunia Kalisakara, dan Anugrah Ba'da Ramadhan
- (Alm) mbah Siswosukaryo dan (Alm) mbah Sumiyati
- (Alm) mbah Harjo Diryo
- (Alm) mbah Yoto
- (Alm) mbah buyut kakung
- Seluruh keluarga besar dan teman-teman yang tidak dapat Saya sebutkan satu-persatu

KATA PENGANTAR

Tak ada henti-hentinya Peneliti mengucap syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ijin-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun.

Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Pengelolaan Rusunawa Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman** merupakan bentuk pertanggung jawaban yang akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan penelitian. Pada kesempatan ini Peneliti juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT karena telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini
2. Nabi Muhammad SAW
3. Kedua Orangtua yang telah memberikan semangat, nasihat serta motivasinya
4. Bapak Habib Muhsin, S.sos, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta
5. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta
6. Ibu Dra. Tri Daya Rini, M.Si selaku Dosen Wali
7. Bapak Drs. Parwoto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing Peneliti
8. Bapak Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si selaku Dosen Penguji Samping 1
9. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P selaku Dosen Penguji Samping II
10. Gubernur DIY c.q Biro Adminstrasi Pembangunan Setda DIY
11. Bupati Sleman c.q KA. Bakesbanglinmas Sleman

12. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman
13. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Sleman
14. Kantor Pelayanan Unit Rusunawa Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman
15. Paguyuban Rusunawa Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman
16. Keluarga besar serta teman-teman kuliah STPMD “APMD" Yogyakarta angkatan tahun 2011 dan 2012

Peneliti menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dihidup ini, begitu juga dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan.

Yogyakarta, 26 Oktober 2016

(ERRA KARYASTI DWI KARUNIA)

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... i

Halaman Judul..... i

Halaman Pengesahan..... ii

Halaman Motto..... iii

Halaman Persembahan..... iv

Kata Pengantar..... v

Daftar Isi..... vii

Daftar Tabel..... x

Daftar Gambar..... xi

Sinopsis..... xii

Bab 1 : Pendahuluan..... 1

1. Latar Belakang Masalah..... 1
2. Rumusan Masalah..... 6
3. Tujuan Penelitian..... 6
4. Manfaat Penelitian..... 7
5. Kerangka Teori..... 8
6. Ruang Lingkup..... 29

7. Metode Penelitian..... 30

a. Jenis Penelitian..... 30

b. Unit Analisis..... 31

c. Teknik Pengumpulan Data..... 31

d. Teknik Analisis Data..... 34

Bab II Profil Dinas.....35

1. Letak Geografis..... 35
2. Komposisi Pegawai DPUP..... 35

a. Berdasarkan jenis kelamin..... 35

b. Berdasarkan usia..... 37

c. Berdasarkan pendidikan..... 38

d. Berdasarkan golongan..... 39

e. Berdasarkan agama..... 39

3. Kelembagaan 40

a. Visi..... 40

b. Misi..... 40

c. Tujuan..... 40

d. Sasaran..... 41

4. Tugas Pokok dan Fungsi..... 42
5. Bagan Struktur Organisasi..... 50
6. Profil Rusunawa Sleman..... 51

Bab III Analisis Data..... 55

1. Deskripsi Informan..... 55
   a. Berdasarkan Jenis Kelamin..... 56
   b. Berdasarkan Usia..... 57
   c. Berdasarkan Pendidikan..... 58
   d. Berdasarkan Pekerjaan..... 59
2. Analisis Data.....60
   a. Aktivitas-aktivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam perencanaan dalam pengelolaan Rusunawa Dabag..... 61
   b. Aktivitas-aktivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam pembagian tugas dalam pengelolaan Rusunawa Dabag..... 72
   c. Aktivitas-aktivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam mendorong untuk bekerja pengelolaan Rusunawa Dabag..... 79
   d. Aktivitas-aktivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam pengawasan pengelolaan Rusunawa Dabag..... 95

Bab IV Penutup 107

1. Kesimpulan..... 107
2. Saran..... 109

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.....35

Tabel I.2..... 37

Tabel I.3..... 38

Tabel I.4..... 39

Tabel I.5..... 39

Tabel II.1..... 56

Tabel II.2..... 57

Tabel II.3..... 58

Tabel II.4.....59

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.....50

SINOPSIS

Rumah susun sederhana sewa yang selanjutnya disebut rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah status penguasaanya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian. Rusunawa Dabag merupakan salah satu rusunawa di Kabupaten Sleman. Agar pengelolaan rusunawa dapat berjalan maka dibutuhkan pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui UPT Rusunawa Sleman.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Pengumpulan data menggunakan observasi, interview, serta dokumentasi. Penentuan Informan menggunakan *Purposive Sampling.*Informan yang dilibatkan berjumlah 11 orang. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data, penilaian data dan interpretasi data.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka Peneliti dapat menginterprestasikan sebagai berikut.

Dalam pengelolaan rusunawa yang dilihat dari fungsi manajemen *Planing, organizing, actuating, serta controling*.(a) *planning*/perencanaan dilihat dari perencanaan sumber dana yang digunakan untuk pengelolaan rusunawa, sumber dana tersebut berasal dari APBD. UPT Rusunawa membuat rencana anggaran DPA, diajukan ke DPUP, DPKAD, Bapeda, dan DPRD, setelah disahkan jadilah DPA. Nanti tiap bulannya UPT mengajukan pengajuan dana ke DPUP. Untuk perencanaan terkait pembangunan fisik dari mulai perencanaan sampai pembangunan dilakukan oleh DPUP.Jadi yang terlibat yaitu UPT Rusunawa, DPUP,DPKAD,Bapeda, dan DPRD.Kendala-kendala dalam perencanaan pengelolaan rusunawa diantara terkait dengan dana dan sumber daya manusianya. (b)*organizing/*penggolongan tugas : tugas DPUP berkaitan dengan pembangunan fisik dan pemberian ijin pemanfaatan rusunawa sedangkan tugas UPT Rusunawa adalah pengelolaan rusunawa di Sleman.

(c) *actuating/*mendorong pegawai : Kepala UPT sudah mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk mendorong pegawainya, seperti mendukung pegawainya yang akan melanjutkan pendidikan, pembinaan, serta diklat. Komunikasi, kerjasama dan koordnasi juga dilakukan oleh DPUP dengan UPT Rusunawa.Begitu juga untuk membuat penghuni merasa nyaman sudah dilakukan antara lain dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat (d) *controling/*pengawasan kepada UPT menjadi tanggungjawab Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, pengawasannya secara langsung maupun tidak, pengawasan Kepala UPT kepada Stafnya dengan melalui laporan-laporan, terkait dengan pemanfaatan rusunawa, UPT Rusunawa telah melaksanakan prosedur rekrutmen hunian penghuni sesuai dengan aturan yang ada.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman pada pasal 5 ayat 1 telah mengamanatkan bahwa negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya dijelaskan pada ayat 2, pembinaan yang dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh : Menteri pada tingkat nasional, Gubernur pada tingkat provinsi, dan Bupati/Walikota pada tingkat kabupaten/kota. Sudah disinggung di atas bahwa Negara mempunyai tanggungjawab atas penyelenggaraan perumahan, maka dalam implementasinya harus berasaskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 pasal 2, diantaranya keterjangkauan dan kemudahan, kesehatan, dan keadilan pemerataan.

Pengadaan perumahan sangat penting untuk dilakukan, di mana kebutuhan dasar ini akan menentukan taraf kesejahteraan sekaligus kualitas hidup manusia itu sendiri karena itu suatu hunian pada hakekatnya dapat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan orang-orang yang tinggal di dalamnya (http://untag-smd.ac.id/files/contoh%20jurnal%20Sri%20Wahyuni2 Edit 3.pdf).

Keberadaan tempat tinggal ternyata tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung dari panas, hujan, maupun dari segala ancaman binatang buas, tapi juga menentukan taraf kesejahteraan seseorang. Tempat tinggal menjadi salah satu kebutuhan dasar (*basic human needs*) bagi setiap orang dan setiap orang berhak untuk memiliki tempat tinggal di lingkungan yang baik dan sehat, sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi :“setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Sejalan dengan tuntutan tersebut, Negara harus memberikan apa yang menjadi hak Masyarakat itu, sebaliknya Masyarakat juga harus sadar apa kewajibannya, misalnya dengan tidak mendirikan bangunan di tanah yang bukan menjadi miliknya.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin 2001 : 2). Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah dimaknai sebagai hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai perundang-undangan. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi, hak dan wewenang untuk memanajemeni daerah, dan tanggung jawab untuk kegagalan memanajemeni daerah. (Riant Nugroho Dwidjowijoto, 46:2000)

Hak, kewajiban dan kewenangan tersebut membuat pemerintah daerah harus mampu menangkap yang sebenarnya dibutuhkan serta menjadi kepentingan masyarakatnya. Misalnya, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lewat pengadaan hunian layak serta terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sebagian besar masyarakat belum mampu membeli rumah sendiri, penyebabnya bisa dikarenakan harga rumah ataupun tanah terutama di daerah perkotaan yang belum dapat dijangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat menengah. Dengan otonomi daerah diharapkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dapat tepat mengenai sasaran.

Maraknya pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebagai dampaknya, kota-kota tersebut akan menjadi magnet bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal. Namun urbanisasi ini menimbulkan berbagai macam masalah karena tidak ada pengendalian didalamnya. Kondisi perkotaan yang semakin tidak terkendali akibat adanya urbanisasi yang berlebih, telah menimbulkan berbagai masalah baru seperti meningkatnya kriminalitas akibat kemiskinan, pengangguran besar-besaran, bertambahnya pemukiman kumuh dan sebagainya.
(http://download.org/artice.php?article=273874&val=54318titledampak%20urbanisasi %20bagi20%20perkembangan%20kota%20Di20%Indonesia)

Persoalan menjadi lain bagi mereka yang turut dalam arus urbanisasi, tetapi gagal mencari pekerjaan. Bagi Mereka pokok persoalan kemiskinan disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer sehingga timbul tuna karya, tuna susila, dan lain sebagainya (Soekanto Soerjono, 2010 :320)

Salah satu permasalahan pemukiman yang dihadapi kota besar semakin komplek. Penggunaan lahan untuk bangunan yang terus meningkat menimbulkan masalah yang akan datang. Tingginya tingkat kelahiran dan migrasi penduduk yang terbentur pada kenyataan bahwa lahan di perkotaan semakin terbatas dan nilai lahan yang makin meningkat (http://ejournal.stiesa.ac.id/jira/article/downloadsuppfile/189/89)

Selain itu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kesehjateraan Masyarakat. Namun jika diamati khususnya di daerah perkotaan, kesejahteraan Masyarakatnya belumlah merata, artinya baru dinikmati oleh sebagian kecil warga kota saja. Tidak akan sulit untuk menjumpai si kaya si miskin, dan daerah/rumah-rumah kumuh.

Masyarakat ekonomi rendah pun kurang diperhatikan dan tersisihkan. Dari uraian permasalahan tersebut, Pemerintah mendapatkan solusi jitu dengan melakukan pengadaan hunian yang mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya layak serta terjangkau dengan keamanan, lingkungan sehat, bersih, tertata, efisiensi lahan, dan benar-benar diorientasikan bagi masyarakat ekonomi rendah dengan pembangunan rumah susun.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, pasal 45 ayat 1 menjelaskan penguasaan sarusun (satuan rumah susun) pada rumah susun umum dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa, yang kemudian disebut dengan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Selanjutnya pada pasal 5, bahwa penguasaan sarusun dengan cara sewa dilakukan dengan perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap penyewa mempunyai hak, kewajiban serta larangan yang mesti dipatuhi. Rusunawa dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Latar belakang tersebut yang juga mendasari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan pengadaan hunian yakni rusunawa. Berdasarkan data yang didapat dari Tribun Jogja (05/5), Hingga saat ini Kabupaten Sleman memiliki 11 *twin block* (gedung bertingkat) rusunawa. Jumlah tersebut terbagi di empat lokasi di wilayah Sleman, dan masing-masing *twin block* memiliki 192 unit hunian. Salah satunya berada di Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, Rusunawa ini terdiri dari rusunawa Dabag 1 dan 2 yang terdiri dari dua *twin block* dan memiliki total 198 hunian. Rusunawa Dabag 3 yang terdiri satu *twin blok* dengan 75 unit hunian, dan rusunawa Dabag 4 yang terdiri dari satu *twin block* dan memiliki 96 unit hunian.

Pembangunan rusunawa bertujuan untuk memberikan solusi atas kebutuhan perumahan yang sederhana dan sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, diperuntukkan untuk penataan wilayah daerah bantaran sungai dan tempat-tempat yang kumuh di Kabupaten Sleman, selain itu pembangunan rusunawa juga memberikan kontribusi PAD Kabupaten Sleman. (Informasi Hunian Sederhana Sewa Rusunawa)

Pengelolaan rusunawa ini dilaksanakan oleh UPT (Unit Pelaksana Tekhnis) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, pada pasal 9 Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2013 menjelaskan UPT mempunyai peran yang besar dalam meneliti dan pengkajian berkas permohonan izin yang telah lengkap dan benar, UPT juga dapat melakukan peninjauan lokasi dalam rangka meverifikasi persyaratan administrasi, berdasarkan hal tersebut kemudian Kepala UPT dapat juga memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk menerima atau menolak permohonan, kemudian Kepala Dinas memberikan keputusan atas permohon izin tersebut. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon calon penghuni rusunawa diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2013 tentang pemanfaatan rumah susun sederhana sewa pasal 8, diantaranya, fotocopy KTP yang sudah dilegalisir atau surat keterangan tinggal sementara yang masih berlaku, fotocopy kartu keluarga yang sudah dilegalisir, fotocopy surat nikah/akte perceraian yang sudah dilegalisir, surat pernyataan belum memiliki rumah, dll. Semua syarat tersebut dibuat ketat agar rusunawa dapat disewa oleh masyarakat yang berhak.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana fakta sebenaranya di lapangan ? ternyata pemanfaatan hunian yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut terindikasi tidak tepat sasaran, koran Tribun Jogja (05/5) memberitakan bahwa rusunawa di Sleman terindikasi menyimpang dari tujuan

awal sebagai hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah kepemilikan KTP atau Surat Keterangan Tinggal Sementara merupakan surat keterangan penduduk yang tinggal sementara di daerah yang bukan domisilinya. Dengan surat tersebut, dimungkinkan warga luar Kabupaten Sleman dapat menjadi penghuni rusunawa. Hal tersebut justru akan merugikan penduduk asli Sleman tidak bisa terserap penuh menjadi penghuni rusunawa. Disebutkan syarat lain untuk menjadi penghuni rusunawa yaitu sudah berkeluarga dibuktikan dengan fotocopy surat nikah dan kartu keluarga, akan tetapi di Tribun Jogja (05/5) menyatakan bahwa di rusunawa Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman ada mahasiswa yang menyewa satu unit tempat tinggal di rusunawa tersebut.

Untuk itu dibutuhkan peran UPT Rusunawa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk menutup celah-celah tersebut, agar rusunawa dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dari pemaparan kondisi di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Pengelolaan Rusunawa.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, yang menjadi rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Pengelolaan Rusunawa Dabag Condongcatur Depok Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Pengelolaan Rusunawa Dabag Condongcatur, Depok, Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

Manullang, M. *Dasar-dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta:2002.

Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar.*Metodologi Penelitian Sosial.* PT. Bumi Aksara, Jakarta :1996.

H. HA.Dari Nawawi.*Metode Penelitian Bidang Sosial*.Gajah Mada University Press, Yogyakarta : 1983.

J.Panglaykim & Hazil. *Manajemen Suatu Pengantar*.Ghalia Indonesia, Jakarta Timur : 1960.

Soerjono, Soekanto.*Sosiologi Suatu Pengantar*.Raja Grafindo Persada, Jakarta : Cetakan ke 43: 2010.

H.Ateng Syafrudin.*Kapita Selekta, Hakikat Otonomi dan Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah.*Citra Media , Yogyakarta : 2006.

Usman, Sunyoto. *Sosiologi, Sejarah, Teori dan Metodologi*.CIReD, Yogyakarta : 2004.

Deddy Supriyadi Baratakusumah & Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2001.

Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*.PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta : 2000.

S.Nasution.*Metode Research (penelitian ilmiah)* PT.Bumi Aksara, Jakarta : 2007.

Sondang P. Siagian.*Fungsi-fungsi Manajerial*.Bumi Aksara,Jakarta:1996.

Basir, Barthos.*Manajemen Sumber Daya Manusia*.Bumi Aksara,Jakarta :1999.

SaifulAhmad Laring.*Pemerintah Daerah*.Litera Buku,Yogyakarta:2012.

Inu Kencana Syafi'ie. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*.PT.Refika Aditama :2006.

Maleong, Lexy J.*Metode Penelitian Kualitatif*.PT.Remaja RosdaKarya, Bandung: 2001.

Arikunto.*Metode Penelitian*.Rineka Cipta,Jakarta:1995.

Informasi Hunian Sederhana Sewa

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1984, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta.

UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 H

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

UU No 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Rusunawa

Peraturan Bupati Sleman No. 58 Tahun 2009

Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2013

Sumber lain :

Koran Tribun Jogja Tanggal, 5 Mei 2015

http://sulselprov.go.id/berita-pembagian-urusan-pemerintahan-yang-menjadi-kewenangan-pemda--berdasarkan-uu-23-tahun-2014-.html.

http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-pemerintah-pemerintahan-dan.html

http://harryuban.blogspot.com/2014/12/review-uu-no-23-tahun-2014-tentang.html

http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JTSI/article/view/922.

Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 2015

http://eprints.undip.ac.id/42761/2/ERWIN_TOMMY_H.M_(L2B009102)_BAB_I_PENDAHULUAN.pdf.

http://www.academia.edu/24245122/MAKALAH_FUNGSI_PELAKSANAAN_ACTUATING_DALAM_MANAJEMEN_SUMBER_DAYA_MANUSIA.

http://www.prosesindustri.com/2015/01/proses-perencanaan-dalam-manajemen.html.

http://untag-smd.ac.id/files/Contoh%20Jurnal%20Sri%20Wahyuni_2_Edit_3.pdf

http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/347/193

http://www.academia.edu/9686127/makalahpengawasan

http://pemerintah.net/pemerintah-daerah

http://download.org/artice.php?article=273874&val=54318titledampak%20urbanisasi%20bagi20%20perkembangan%20kota%20Di20%Indonesia

http://ejournal.stiesa.ac.id/jira/article/downloadsuppfile/189/89

http://www.artikelsiana.com/2014/12penegrtian-jenis-peran-sosial-definisi.html

http://digilib.Unila.ac.id/85/8/bab%2011.pdf

http://eprints.uny.ac.id/9762/3/bab%202%20-%20%2007108248206.pdf

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24955/4chapter%2011.pdf